

Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah (Suatu Tinjauan Kritis Filosofis)

Oleh: Anzar Abdullah^{*)}

***Abstrak:** Perjalanan praktek dan refleksi pendidikan selama 60 tahun Indonesia merdeka; dalam rekaman sejarah tidak mengalami kemajuan yang berarti, bahkan boleh dikatakan lemah dalam visi dan misi global. Selama Indonesia merdeka, yang terjadi dalam dunia pendidikan di Republik ini, hanyalah pergantian kurikulum dan uji-coba kurikulum, sesuai dengan kepentingan politik penguasa. Padahal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam proses pendidikan, bukan terletak pada bongkar pasang kurikulum, tetapi adalah: menjadikan sektor pendidikan menjadi pilar utama pembangunan nasional untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam mengikuti kompetisi global. Tulisan ini membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dalam prakteknya; bagaimana kurikulum pendidikan menjadi bagian dari kepentingan politik birokrasi; serta bagaimana guru dan sekolah menyikapi setiap perubahan dan pergantian kurikulum.*

***Kata kunci:** kurikulum pendidikan, sepanjang sejarah, tinjauan kritis filosofis*

1. Pendahuluan

Sesuai dengan judulnya, maka tulisan ini bertujuan untuk membuka dan mengembangkan wacana publik mengenai sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Bahwa dengan berbagai bukti pengalaman sejarah di masa lalu,

kurikulum pendidikan yang seharusnya mengantarkan rakyat Indonesia eksis dan mampu berkompetisi di dunia internasional, ternyata justru semakin memperburuk kehidupan mereka, bahkan nyaris menjadi bangsa pendatang dan terasing di negerinya sendiri. Oleh

^{*)} Anzar Abdullah adalah Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi yang diperbantukan pada STKIP Veteran Sidrap.

karena itu, dengan membuka lembaran sejarah kurikulum di Indonesia, diharapkan pemerintah dari segenap komponen bangsa yang terkait langsung menangani pendidikan di Indonesia, mencari formulasi-formulasi dan format-format yang tepat dalam pengembangan kurikulum yang bernuansa global, kuat dalam visi, dan tidak menghilangkan nuansa kepribadian bangsa Indonesia. Harapan ini tentu dengan tujuan agar anak-anak bangsa ini dapat bangkit dan mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia internasional, yang tentu saja bisa dilahirkan dari proses pendidikan yang kuat dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menelusuri benang sejarah 60 tahun Indonesia merdeka, seharusnya pemerintah dan semua komponen bangsa, memiliki rasa malu terhadap jejak-jejak sejarah kolonial Belanda. Atau setidaknya malu pada roh perintis nasionalisme yang mengedepankan pendidikan untuk kemajuan peradaban.

Harus diakui, bahwa politik "etis" kolonial Belanda sekitar tahun 1900 bersifat setengah hati, yang lebih menyikapi tuntutan abad pencerahan di Eropa, di mana para penjajah harus membayar secara moral atas rampasan dan penghisapan yang

dilakukannya di tanah jajahan. Rakyat kemudian diberi pendidikan untuk mendapatkan pencerahan, walau sasarannya terbatas pada kaum ningrat dan priyayi. (Sularto, ST, Kompas, 16 Agustus 2005)

Meskipun demikian, sejelek-jelek pemerintahan kolonial Belanda, mereka telah meninggalkan infrastruktur persekolahan yang sisasisanya masih bisa ditemukan berdiri kokoh di sejumlah daerah. Daya tahan bangunan Belanda berbanding terbalik dengan bangunan karya orang-orang republik ini.

Tidak kalah pentingnya, sekolah kolonial Belanda telah memberikan semangat nasionalisme. Dalam darah mereka mengalir semangat intelektualisme, di mana pendidikan diyakini sebagai jembatan emas menuju pencerahan dan kemerdekaan bangsa. Sebutlah tokoh-tokoh, seperti Oemar Said Cokroaminoto, Wahidin Sudirohusodo, Soewardi Suryaningrat atau yang dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantoro, Soekarno, Moehammad Hatta, dan Sutan Syahrir.

Bila kemudian, setelah 60 tahun kemerdekaan republik ini kita raih, anak-anak bangsa tidak semuanya bisa mengenyam dan menikmati pendidikan yang layak bagi kemanusiaan. Pendidikan gratis 9

tahun masih dalam sebuah wacana. Hal ini berarti, bukan hanya sekedar terjadi pelapukan proses berbangsa, tapi bahkan terjadi kemunduran zaman dan kemunduran peradaban. Mungkin hal ini sangat relevan dengan kisah imajiner dari Afrizal Malna (Kompas, 5 Agustus 2005) tentang seorang rakyat jelata yang terpaksa memilih berjalan mundur untuk menghindari jebakan ruang dan waktu.

Sementara itu, bagaimana peran kurikulum dalam proses pendidikan? Hal ini tentu saja merupakan faktor yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian, karena kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, adalah menjadi tugas utama pendidikan yang digariskan dalam kurikulum pendidikan.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dari pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (Pasal 1). Demikian juga bahwa untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional, kurikulum disusun dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (Pasal 37).

Menyimak Pasal 1 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam perkembangan masyarakat global, khususnya yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya Indonesia menjadi bagian dari kompetisi itu. Untuk itu, segala perkembangan masyarakat dunia tentu perlu menjadi masukan untuk menjadi bahan kajian, serta diterapkan dalam penyesuaian pola-pola kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut akan menjadi bahan acuan dalam upaya pengembangan kehidupan masyarakat dalam segala bidang, khususnya dalam penyusunan kurikulum pendidikan yang diberlakukan pada setiap jenjang persekolahan. Dengan demikian, maka peran dan fungsi kurikulum bagi proses pendidikan adalah merupakan pedoman atau acuan pokok di dalam pelaksanaan proses pendidikan. Sebagai pedoman

atau acuan pokok, maka seharusnya kurikulum tidak mengatur secara detail mengenai bagaimana proses atau teknisnya, tetapi persoalan ini diberikan kepada sekolah untuk pengelolaannya. Termasuk di dalamnya adalah manajemen berbasis sekolah (MBS). Alasannya adalah bahwa tidak semua sekolah di Indonesia memiliki karakteristik yang sama. Oleh karena itu, muatan lokal dalam kurikulum diberikan kepada sekolah atau daerah masing-masing untuk merancang kurikulumnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa kurikulum Dikdasmen dikembangkan sesuai dengan relevansi setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah (Nyoman S. Degeng, 2006). Arti dan makna kurikulum dalam perangkat kurikulum nasional adalah kurikulum merupakan serangkaian tujuan pendidikan yang menggambarkan berbagai kemampuan (pengetahuan dan keterampilan), nilai dan sikap yang harus dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik dari suatu satuan pendidikan. HAR Tilaar (1999) menyatakan bahwa kurikulum merupakan kerangka acuan tentang materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari untuk

menguasai serangkaian kemampuan, nilai dan sikap yang secara instiusional harus dikuasai oleh para peserta didik setelah selesai pendidikannya. Selanjutnya, kurikulum merupakan garis besar materi dari suatu bidang mata pelajaran yang telah dipilih untuk dijadikan obyek belajar, serta panduan bagi penyusunan buku pelajaran yang disusun untuk menunjang terjadinya proses belajar-mengajar (Suke, 2004, hal. 28-29).

Implementasi kurikulum pendidikan pada tingkat pembelajaran di sekolah merupakan tanggung jawab guru dan sekolah dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar, baik besaran atau banyaknya jam pelajaran, maupun evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru dan sekolah sebagai bagian kegiatan terpadu dari strategi belajar mengajar yang direncanakan dengan baik (Prasetyo Utomo, 2006).

2. Kajian Teori dan Bahasan

2.1 Pendidikan dan Kepentingan Politik Praktis

Sejak kurikulum pendidikan yang pertama (kurikulum 1947) hingga sekarang, tampaknya ada degenerasi dalam hal tujuan utama kegiatan pendidikan. Antara lain semakin etatifnya praktik pendidikan yang

tidak mempertimbangkan aspek urgensi, substansi, dan implementasi, sehingga diibaratkan sebuah penyakit; kaki yang sakit kepala yang diobati; tentu saja tidak akan sembuh penyakitnya (Nasrullah, 2006).

Dalam sampul Majalah Basis Juli – Agustus 2000, menggaris-bawahi catatan Shindunata, “Bahwa pendidikan hanya menghasilkan air mata”. Ilustrasinya, air mata meleleh dari kelopak mata seorang ayah yang tertusuk pulpen.

Banyak ahli dan pemerhati pendidikan sangat prihatin. Bahkan ada yang menarik tali sejarah lebih panjang lagi ke zaman Jepang sejak masuknya tahun 1942 sebagaimana yang dilansir oleh Slamet Imam Santoso (1995). Praktik pendidikan di Indonesia sudah mengalami keterpurukan sejak zaman Jepang, dan bersambung sampai zaman kemerdekaan. Ada mitologi yang berkembang, bahwa baik tidaknya pendidikan nasional, senantiasa hanya dilihat sebagai solusi keterpurukan bangsa (Sularto, ST, 2005).

Memang benar, bahwa kurikulum pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dunia politik. Adagium politik pendidikan sebagai bagian dari “*nation and character building*” disadari sejak awal kemerdekaan Indonesia, bahkan jauh sebelumnya,

sebagaimana yang telah dirintis oleh perguruan Taman Siswa (IAR. Tilaar, 2000, hal. 29).

Empat bulan setelah Indonesia merdeka, dunia pendidikan nasional mulai dibenahi. Pada tahun 1947 terbentuklah “Sistem Persekolahan” sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, termasuk Sekolah Rakyat (SR) enam tahun. Sistem itu tidak sempat dipraktikkan dan dikembangkan, barulah tahun 1960 tersusun undang-undang yang menjadi payung hukum kegiatan pendidikan.

Sesuai dengan Keputusan MPRS No II/MPRS/1960 tentang Manusia Sosialis Indonesia, disusunlah Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Keppres No. 14 tahun 1965. Kemudian keluar lagi Keppres No. 19 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Jiwa dan visi kurikulum adalah gotongroyong dan demokrasi terpimpin.

Orde lama runtuh, keluar Ketetapan MPRS No XXVII/MPRS/1966, yang berisi tentang tujuan pendidikan nasional “membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945” lahiriah kurikulum 1968, sebagai sebuah pedoman praktik pendidikan yang tersusun untuk pertama kalinya.

Menurut kurikulum ini, tujuan pendidikan nasional adalah: mempertinggi mental moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

2.2 Gambaran dan Ciri-ciri Kurikulum Pendidikan di Indonesia dalam Perkembangan Sejarah

2.2.1 Kurikulum 1947

Kurikulum yang pertama kali diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia pada awal kemerdekaan ialah kurikulum 1947 yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan bangsa Indonesia. Penerbitan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 yang merumuskan pula tujuan kurikulum menurut jenjang pendidikan. Sekolah mengharuskan penyempurnaan kurikulum 1947 agar lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Berikut ini ciri-ciri kurikulum 1947: (a) sifat kurikulum *Separated Subject Curriculum* (1946-1947), (b) menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, (c) jumlah mata pelajaran: Sekolah Rakyat (SR) - 16 bidang studi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) - 17 bidang

studi, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Jurusan B 19 bidang studi, dan (d) Menteri Pendidikan dan Pengajaran: Mr. Soewandi.

2.2.2 Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 ditandai dengan pendekatan pengorganisasian materi pelajaran dengan pengelompokan suatu pelajaran yang berbeda, yang dilakukan secara korelasional (*correlated subject curriculum*), yaitu mata pelajaran yang satu dikorelasikan dengan mata pelajaran yang lain, walaupun batas demarkasi antar mata pelajaran masih terlihat jelas. Muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terkait erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Pengorganisasian mata pelajaran secara korelasional itu berangsur-angsur mengarah kepada pendekatan pelajaran yang sudah terpisah-pisah berdasarkan disiplin ilmu pada sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Berikut ciri-ciri kurikulum 1968: (a) sifat kurikulum *Correlated Subject Curriculum*, (b) jumlah Mata Pelajaran: SD - 10 bidang studi, SMP - 18 bidang studi (Bahasa Indonesia dibedakan atas Bahasa Indonesia I dan II), SMA Jurusan A - 18 bidang studi, SMA Jurusan B - 20 bidang studi, SMA Jurusan C - 19 bidang

studi, (c) penjurusan di SMA dilakukan di kelas II, dan disederhanakan menjadi dua jurusan, yaitu: Sastra Sosial Budaya dan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam (PASPAL), dan (d) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri, SH (1968-1973).

2.2.3 Kurikulum 1975

Di dalam kurikulum 1975, pada setiap bidang studi dicantumkan tujuan kurikulum, sedangkan pada setiap pokok bahasan diberikan tujuan instruksional umum yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai satuan bahasan yang memiliki tujuan instruksional khusus. Dalam proses pembelajaran, guru harus berusaha agar tujuan instruksional khusus dapat dicapai oleh peserta didik, setelah mata pelajaran atau pokok bahasan tertentu disajikan oleh guru. Metode penyampaian tertentu disajikan oleh guru. Metode penyampaian satuan bahasan ini disebut Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Melalui PPSI ini dibuat satuan pelajaran yang berupa rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Berikut ini ciri-ciri kurikulum 1975: (a) sifat kurikulum *Integrated Curriculum Organization*, (b) jumlah mata pelajaran berdasarkan tingkatan adalah SD mempunyai satu struktur program, yang terdiri atas 9 bidang

studi, termasuk mata pelajaran PSPB, Pelajaran Ilmu Alam dan Ilmu Hayat digabung menjadi satu dengan nama Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Pelajaran Ilmu Aljabar dan Ilmu Ukur digabung menjadi satu dengan nama Matematika, Jumlah mata pelajaran di SMP dan SMA menjadi 11 bidang studi, (c) penjurusan di SMA dibagi atas 3, yaitu: jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, Penjurusan dimulai di kelas I, pada permulaan semester II, dan (d) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Syarif Thayeb (1973 - 1978).

2.2.4 Kurikulum 1984

Kurikulum 1984, pada hakikatnya adalah merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ini adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Berikut ciri-ciri kurikulum 1984: (a) sifat kurikulum *Content Based Curriculum*, (b) program mata pelajaran mencakup 11 bidang studi, (c) jumlah mata pelajaran di SMP - 11 bidang studi, (d) jumlah mata pelajaran di SMA- 15

bidang studi untuk program inti dan 4 bidang studi untuk program pilihan, (e) penjurusan di SMA dibagi atas 5 (lima) jurusan, yaitu: Program A₁ (Ilmu Fisika), Program A₂ (Ilmu Biologi), Program A₃ (Ilmu Sosial), Program A₄ (Ilmu Budaya), dan Program A₅ (Ilmu Agama), (f) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto (1983 – 1985).

Kemudian ada perubahan lagi di mana penjurusan dilakukan di kelas 2, dan jurusan dibagi atas 3, yaitu: jurusan yaitu IPA, IPS, dan Bahasa.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kurikulum 1984 telah melandasi agenda serangkaian rapat kerja nasional (Rakernas) Depdikbud. Rakernas 1986 merekomendasikan perlunya perintisan penyusunan kurikulum nasional yang menjamin tersedianya peluang untuk diisi dengan muatan lokal. Demikian pula hasil Rakernas 1987 juga merekomendasikan perlunya dikembangkan pola pendidikan dasar 9 tahun. Sebagai tindak lanjutnya, maka dalam Rakernas 1988 Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Begitu juga dengan hasil Rakernas 1989, merekomendasikan perlunya pembenahan materi pelajaran Bahasa, IPA, dan Matematika. Sementara dalam Rakernas 1987 sampai dengan Rakernas 1990, juga membahas

tentang perlunya pembenahan materi pelajaran P4, PMP, dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), serta peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung di SD (Djamil Ibrahim, 1999).

Perubahan dan penyempurnaan kurikulum yang dilakukan selama proses perubahan kurikulum tampaknya belum mampu meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mendasar tersebut dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya maka disusun kurikulum 1994 (Syamsuddin, 1998).

Untuk penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka diadakan penyesuaian berupa peninjauan kembali terhadap kurikulum 1984 yang sedang berlaku, yang meliputi: (1) fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (2) fungsi dan tujuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; (3) isi kurikulum; (4) penjenjangan pendidikan dalam jalur pendidikan sekolah, dan (5) adanya dua macam muatan dalam kurikulum, yaitu muatan nasional dan muatan lokal (Seri Kebijakan Depdikbud, K.93, 1993).

Upaya memperbaiki kurikulum 1984 menuju tersusunnya kurikulum 1994, dilandasi atas dasar Pasal 1 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar rumusan yuridis tersebut menunjukkan adanya dua dimensi pokok kurikulum, yaitu produk dan proses, yang secara keseluruhan mencakup aspek materi, pengalaman siswa, tujuan kegiatan belajar mengajar, dan hasil kegiatan belajar mengajar, serta evaluasi belajar mengajar.

2.2.5 Kurikulum 1994

Dengan mendasarkan kepada seluruh proses penyusunan kurikulum pada ketentuan-ketentuan yuridis dan akademis di atas, maka diharapkan kurikulum 1994 telah mampu menjembatani semua kesenjangan yang terdapat dalam dunia pendidikan di sekolah. Namun, harapan itu sepertinya tidak terwujud sebagaimana diperlihatkan oleh sedemikian banyak dan gencarnya keluhan pengelola pendidikan mengenai berbagai kelemahan dan kekurangan kurikulum 1994. Adapun ciri-ciri kurikulum 1994 adalah sebagai berikut: (a) sifat kurikulum *Objective Based Curriculum*, (b) nama SMP dan SLTP kejuruan diganti menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama),

(c) mata pelajaran PSBP dan keterampilan diadadakan, program pengajaran SD dan SLTP disusun dalam 13 mata pelajaran, nama SMA diganti menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum), (d) program pengajaran di SMU disusun dalam 10 mata pelajaran, (e) penjurusan di SMU dilakukan di kelas II, (f) penjurusan dibagi atas tiga jurusan, yaitu jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, (g) SMK memperkenalkan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG), dan (h) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ing. Wardiman Djoyonegoro (1993 – 1998)

Aspek yang paling dikedepankan dalam kurikulum 1994, ialah terlalu padat, sehingga sangat membebani siswa yang berpengaruh pada merosotnya semangat belajar siswa, sehingga mutu pendidikan pun semakin terpuruk. Akibatnya adalah siswa enggan untuk belajar lama di sekolah. Jika sejak awal siswa sudah dicemaskan dengan beban mata pelajaran yang menjadi momok di sekolah, maka mereka akan menjadi bosan dan kegiatan belajar mengajar menjadi menyebalkan.

Fenomena tersebut, dipertegas lagi oleh Dirjen Dikdasmen Dr. Indrajati Sidi, dalam kunjungannya ke beberapa sekolah di Kabupaten Lampung (Suara Pembaharuan, 9

Nopember 2003), bahwa ia mengharapkan jumlah jam mata pelajaran dipangkas ratusan jam per tahun, sehingga diperoleh waktu untuk aktivitas tambahan (ekstrakurikuler) yang inovatif, seperti praktek atau berorganisasi. Pemangkasan ini dimaksudkan untuk menata kembali proporsi antara jam pelajaran teori dengan praktek yang berlaku sejak jenjang SD (Republika, 14 Maret 2003, online).

Selain itu, penetapan target kurikulum, di dalam kurikulum 1994, dinilai dan dikecam berbagai pihak antara lain sebagai dosa teramat besar dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengakibatkan kemerosotan kualitas pendidikan secara berkesinambungan tanpa henti (Tintin, Neneng, T., 2003). Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila dikatakan oleh Arif Rahman (Suara Pembaharuan, 2002) bahwa adanya target kurikulum telah menjadi salah satu faktor pemicu untuk penggantian kurikulum baru. Kurikulum 1994 yang padat dengan beban telah menghambat diberlakukannya paradigma baru pendidikan dari siswa kepada guru, yang menuntut banyak waktu untuk menyampaikan pandangan dalam rangka pengelolaan pendidikan. Kurikulum yang padat juga

melanggengkan konsep pengajaran satu arah, dari guru ke murid, karena apabila murid diberikan kebebasan mengajukan pendapat, maka diperlukan banyak waktu, sehingga target kurikulum sulit untuk tercapai.

Kelemahan lain dari kurikulum 1994 menurut Dedi Supriadi (1999) ialah adanya tumpang-tindih antara isi kurikulum. Tumpang-tindih ini terlihat dalam adanya pengulangan pokok-pokok bahasan antara bidang studi satu dengan yang lainnya. Contohnya, dalam mata pelajaran PPKn ada pokok bahasan yang membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI dan BPUPKI; sementara dalam mata pelajaran sejarah juga ada pokok bahasan yang membahas tentang Proklamasi 17 Agustus 1945, PPKI dan BPUPKI. Demikian juga banyak terjadi pengulangan isi di dalam mata pelajaran itu sendiri antar jenjang pendidikan sehingga terkesan sangat membosankan.

Selain itu bertambahnya jam pelajaran dari 36 – 38 jam pada kurikulum 1984, menjadi 42 jam pada kurikulum 1994, berakibat pada beban mengajar guru. Ada guru yang beban mengajarnya bertambah, ada yang berkurang dan ada yang tetap, bahkan ada yang hilang sama sekali seperti PSPB dan pendidikan keterampilan.

Kesan umum dari kurikulum 1994 pada tingkat SMU, adalah jenjang sekolah ini memberikan tekanan kuat pada upaya mengarahkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Praktis tidak ada ruang yang secara langsung dimaksudkan untuk menyiapkan siswa memasuki dunia kerja, antara lain tampak dari tiadanya jam muatan lokal, dan dihapuskannya mata pelajaran keterampilan. Hal ini tampaknya berlandaskan pada isyarat pasal 3 ayat (1) PP No. 29/1990 yang menyatakan, "Pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi".

Memang, secara ideal itu sah-sah saja. Tapi dalam kenyataannya, tidak semua lulusan SMU setiap tahun yang mengikuti UMPTN dapat diterima, hanya sekitar 10% saja yang lolos. Sebagian, lulusan SMU memang ditampung oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS), tapi itu hanya ada separuhnya. Selebihnya mengambil kursus atau terjun langsung ke masyarakat dan mencari kerja. Padahal mereka tidak disiapkan untuk itu, kecuali dengan bekal yang diperolehnya dari materi program pengajaran umum dan khusus. Jadi, mereka dihadapkan pada situasi antara berenang dan tenggelam (Dedi Supriadi, 1997).

2.2.6 Kurikulum 2004

Harapan masyarakat terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia, pada hakikatnya adalah adanya komunikasi dua arah yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar menjadi interaktif dan menyenangkan, baik bagi siswa maupun bagi guru. Belajar menyenangkan itulah sebenarnya konsep pendidikan yang dapat membawa peserta didik (siswa) untuk menguasai kompetensi akademik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Harapan-harapan inilah yang seharusnya diakomodasi di dalam penyusunan kurikulum.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang sampai saat ini masih berlangsung di sekolah-sekolah pada dasarnya adalah merupakan gagasan dari Kurikulum Berbasis Kemampuan Dasar (KBKD) yang pernah diperkenalkan oleh Boediono dan Ella (1999), yang memfokuskan pada wujud pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik. KBK merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Berikut ini ciri-ciri

kurikulum 2004 (KBK): (a) sifat kurikulum *Competency Based Curriculum*, (b) penyebutan SLTP menjadi SMP, (c) penyebutan SMU menjadi SMA, (d) program pengajaran di SD disusun dalam 7 mata pelajaran, (e) program pengajaran di SMP disusun dalam 11 mata pelajaran, (f) program pengajaran di SMA disusun dalam 17 mata pelajaran, (g) penjurusan di SMA dilakukan di kelas II, (h) penjurusan dibagi atas 3 jurusan, yaitu: Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Bahasa, dan (i) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. H. Abdul Malik Fajar (2001–2004).

Berhubung kurikulum 2004 yang memfokuskan aspek kompetensi siswa, maka prinsip pembelajaran adalah berpusat pada siswa dan menggunakan pendekatan menyeluruh dan kemitraan, serta mengutamakan proses pembelajaran dengan pendekatan kontekstual (*contextual teaching and learning* atau CTL).

Dalam pelaksanaan kurikulum yang memegang peranan penting adalah guru. Guru diibaratkan manusia dibalik senjata kosong yang tidak berpeluru. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas guru untuk mengisi senjata itu dan membidikkannya dengan cermat dan tepat mengenai sasaran. Keberhasilan

kurikulum lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kompetensi guru. Oleh karenanya, tidak berlebihan apabila dalam diskusi mengenai “Potret Pendidikan di Indonesia dan Peran Guru Swasta”, J. Drost (2002) menegaskan bahwa materi kurikulum, terutama untuk mata pelajaran dasar, di seluruh dunia pada dasarnya sama. Yang membedakannya adalah cara guru mengajar di depan kelas.

Dalam pelaksanaan KBK dibutuhkan model pengajaran yang lebih interaktif dengan peran yang lebih besar diberikan kepada siswa. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai pence-ramah. Sebagai seorang fasilitator, guru harus kreatif mengelola proses mengajar di kelas dengan menciptakan kondisi kelas yang hidup dan menarik, menciptakan suasana belajar yang rileks, bervariasi, dan membangkitkan rasa keingintahuan yang tinggi, mengoptimalkan daya pikir siswa melalui dengar, lihat dan rasakan, serta mengembangkan daya nalar kritis, sehingga mampu menemukan pemecahan masalah di dalam proses pembelajaran (Gerda K. Wane, Suara Pembaharuan, 9 September 2002). Untuk menguasai kompetensi itu, guru harus melepaskan dirinya dari belenggu paradigma lama, supaya benar-benar

dapat mengenal dengan baik karakter siswanya. Fasilitasi yang diberikan guru kepada siswanya, akan sia-sia bila tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemampuannya menurut perkembangan psikologisnya. Adanya hubungan emosional antara guru dan siswa asuhannya dengan baik, akan memberikan pengenalan yang lebih lengkap, sehingga terjalin hubungan komunikasi yang akrab dan komunikatif. Hubungan yang demikian ini, akan mempermudah guru untuk mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan siswa-siswanya. Pada akhirnya setiap kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya, guru dengan tepat dapat memberikan bantuan pemecahan masalah.

Inti dari KBK atau kurikulum 2004 adalah terletak pada empat aspek utama, yaitu: (1) kurikulum dan hasil belajar, (2) pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, (3) kegiatan belajar mengajar, dan (4) evaluasi dengan penilaian berbasis kelas.

Kurikulum dan hasil belajar memuat perencanaan pengembangan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai usia 18 tahun. Kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil belajar dan indikator dari TK (Taman Kanak-kanak) dan Raudhatul

Athfal (RA) sampai dengan kelas XII (kelas III SMA). Penilaian berbasis kelas memuat prinsip, sasaran dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik melalui identifikasi kompetensi atau hasil belajar yang telah dicapai, pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai, serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Kegiatan belajar mengajar memuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi pula dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum (*curriculum council*), pengembangan perangkat kurikulum, antara lain silabus, pembinaan profesional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum.

Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan kurikulum berbasis sekolah diberikan kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan

Propinsi dan Tingkat Pusat. Peran dan tanggung jawab sekolah untuk meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan konsep KBK; menetapkan tahap dan administrasi KBK; menata ulang penempatan guru pada kelas secara optimal; memberdayakan semua sumber daya dan dana sekolah, termasuk dalam melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk pelaksanaan kurikulum secara bermutu (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdikbud, Edisi Juni 2002).

Dalam uraian berikut ini akan dipaparkan mengenai tujuan penyelenggaraan sekolah dan kompetensi lulusan, mulai dari TK/RA sampai kelas XII (Kelas III SMA/MA).

1) Taman Kanak-kanak dan Raudathul Athfal (TK/RA)

Penyelenggaraan TK/RA difokuskan pada peletakan dasar-dasar pengembangan sikap, pengembangan keterampilan, dan daya cipta sesuai dengan pertumbuhan, dan perkembangannya. TK/RA bukan merupakan jenjang yang diprasyarkan untuk memasuki pendidikan di Sekolah Dasar.

Penyelenggaraan TK/RA secara khusus bertujuan untuk memantapkan perkembangan fisik, emosi, dan

sosial untuk siap mengikuti pendidikan berikutnya, diharapkan setelah mengikuti program TK/RA anak memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah: (1) menunjukkan pemahaman positif tentang diri dan percaya diri, (2) menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan alam sekitar, (3) menunjukkan kemampuan berpikir runtut, (4) berkomunikasi secara efektif, (5) terbiasa hidup sehat, dan (6) menunjukkan kematangan fisik.

2) Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah secara khusus bertujuan untuk: (1) menanamkan dasar-dasar perilaku berbudi pekerti dan berakhlak mulia, (2) menumbuhkan dasar-dasar kemahiran membaca, menulis dan berhitung, (3) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif, (4) menumbuhkan sikap toleran, tanggung jawab, kemandirian, dan kecakapan emosional, (5) memberikan dasar-dasar keterampilan hidup (*life skill*), kewirausahaan, dan etos kerja, dan (6) membentuk rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia.

Tamatan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut: (1) mengenal dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini, (2) mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos kerja, dan peduli terhadap lingkungan, (3) berpikir secara logis, kritis dan kreatif, serta berkomunikasi melalui berbagai media, (4) menyenangi keindahan (estetika), (5) membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat, dan (6) memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah airnya.

3) Sekolah Menengah

Penyelenggaraan sekolah menengah dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kecakapan, dan keterampilan yang kuat untuk digunakan dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan lebih lanjut.

Penyelenggaraan sekolah menengah secara khusus bertujuan untuk: (1) memberikan kemampuan minimal bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan dan hidup dalam masyarakat, (2) menyiapkan sebagian besar warga negara menuju

masyarakat belajar pada masa yang akan datang, dan (3) menyiapkan lulusan menjadi anggota/masyarakat yang memahami dan menginternalisasi perangkat gagasan dan nilai masyarakat beradab dan cerdas.

Sekolah menengah yang bersifat umum menurut kurikulum 2004, terdiri atas: (1) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, dan (2) Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah.

Tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan, (2) memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, (3) berpikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif, memecahkan masalah, serta berkomunikasi melalui berbagai media, (4) menyenangi dan menghargai seni, (5) menjalankan pola hidup bersih, bugar, dan sehat, dan (6) berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah airnya.

Tamatan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah diharap-

kan memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) memiliki keyakinan dan ketegaran sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, (2) memiliki nilai dasar humaniora untuk menerapkan kebersamaan dalam kehidupan, (3) menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik serta beretos kerja, belajar untuk melanjutkan pendidikan, (4) mengalihgunakan kemampuan akademik dan keterampilan hidup di masyarakat lokal dan global, (5) berekspresi dan menghargai seni, (6) menjaga kebersihan, kesehatan, dan kebugaran jasmani, dan (7) berpartisipasi dan berwawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis.

2.3 Bongkar Pasang Kurikulum

Dikembangkannya berbagai uji coba kurikulum, mulai dari apresiasi atas peran swasta, seperti penggunaan sistem modul atau sekolah pembangunan yang berorientasi pada kerja, sampai pada uji coba sistem cara belajar siswa aktif (CBSA), di Malang dan Cianjur, tampaknya tidak menyurutkan hasrat pemerintah untuk selalu melakukan berbagai upaya penggantian dan uji coba kurikulum, termasuk rencana penggantian kurikulum 2004.

Kesempatan memberikan apresiasi pada peran swasta pada awalnya tampak bagus, namun pada akhirnya setelah melihat kondisi liberatif; pemerintah kemudian mengambil alih kendali seluruh praktik pendidikan. Pendidikan yang tadinya liberatif desentralistis, ditarik kembali ke semangat deliberatif dan sentralistis. Pihak swasta tidak lagi dipandang sebagai partner, tetapi sebagai pesaing. Kini otonomi daerah diberlakukan seiring dengan reformasi pemerintahan. Namun lagi-lagi, masalah pendidikan yang diotonomikan di daerah di seluruh Indonesia, tidak lebih baik dari sebelumnya. Timbul banyak masalah, mulai dari penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) sekolah, sampai pada pengangkatan Guru Bantu dan Tenaga Honorer yang carut-marut (Susanto dan Rejeki, Kompas, 11 Juli 2005)

Ketika kurikulum 1968, dicabut dan digantikan dengan kurikulum 1975, tidak membuat praktek pendidikan di tanah air semakin membaik. Bahkan ketika sekolah belum semua menggunakan kurikulum 1975, mulai dirasakan, bahwa kurikulum ini sudah tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Kemudian hadir lah kurikulum 1984. Sebagai tindak lanjutnya maka

pemerintah menerbitkan UU No. 2 Tahun 1989. Undang-undang yang dihasilkan secara terencana lewat sebuah panitia penilai pun tidak lepas dari kritik. Kurikulum 1984 kemudian dianggap sangat sarat dengan beban; lantas muncul lagi kurikulum baru 1994 yang lebih sederhana. Lagi-lagi kepentingan politik praktis lebih menonjol ketimbang berpijak dan berpihak pada kepentingan guru dan anak didik.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 pun diganti; dan setelah lewat proses yang panjang dan menuai banyak kritik; baru terealisasi pada tahun 2003. Bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru 2003, maka hadir pula kurikulum baru 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi (KBK), yang isinya memuat sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap lulusan (Permanasari, Kompas, 30 Desember 2005).

Dalam praktek di lapangan, jangankan KBK, di banyak daerah pedalaman Indonesia, masih ada sekolah yang belum sempat mempraktekkan kurikulum 1994, seperti yang diungkapkan oleh dua orang guru dari pedalaman Tapanuli Selatan Sumatera Utara, masing-masing Ridwan Dalimunthe dan Raja

Dima Siregar (dalam Sularto, ST, Kompas, 16 Agustus 2005). Sampai tahun pelajaran 2005-2006 ini, kurikulum 2004, tetaplah sebagai kurikulum yang belum dipraktekkan secara menyeluruh di tanah air; kemudian akan diganti lagi kurikulum yang baru (Suparno, Kompas, 27 Februari 2006).

Meskipun selalu dibungkus dengan istilah penyempurnaan; pergantian kurikulum 2004, tetap tidak terhindarkan dari kegiatan perombakan kebijakan. Kita menghargai adanya pembenahan kurikulum yang belum sempat tersosialisasi dengan baik, namun perlu mendapatkan pengkajian dan riset terlebih dahulu dari berbagai aspek; termasuk memperhitungkan kelengkapan sarana persekolahan, dan kesiapan guru dan murid. Pertimbangannya adalah apabila penggantian kurikulum tidak dibarengi dengan pembenahan infrastruktur dan standar pelayanan yang baik, ujung-ujungnya adalah kurikulum baru pengganti KBK akan tetap tidak merakyat dan membumi di dalam proses belajar-mengajar dan praktek pendidikan secara keseluruhan. Bahkan bisa muncul lagi kurikulum baru yang dikutak-katik oleh pejabat atau Mendiknas yang baru. Kalau demikian adanya, maka memang

Indonesia (Pemerintah) benar-benar tidak memiliki visi dan misi yang jelas tentang arah dan tujuan pendidikan nasional. Kecenderungannya adalah akan terbukti, bahwa rencana perubahan kurikulum yang setiap waktu lebih bersifat mega proyek, ketimbang kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, yang membutuhkan pelayanan pendidikan secara baik (Sularto, ST, Kompas, 22 Februari 2006).

2.4 Bagaimana Sekolah dan Guru Menyikapi

Guru dan pihak sekolah, sebaiknya berani bersikap mandiri dan tidak dibingungkan oleh keputusan pemerintah yang berencana membatalkan kurikulum KBK. Sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengemas dan merekayasa kurikulum sendiri diharapkan tetap punya keyakinan untuk tidak didikte oleh kurikulum nasional, yang dalam penerapannya mungkin saja sangat detail, tanpa mempertimbangkan aspek muatan lokal, kondisi sosial, budaya masyarakat di daerah tempat sekolah berada. Dalam konteks ini, sekolah, guru dan murid harus yakin dengan pendiriannya (Ali, Kompas, 21 Februari 2006).

Yang jelas dan penting bagi guru adalah kesadaran untuk menerapkan

prinsip-prinsip dan idealisme dalam pendidikan. Hal tersebut perlu untuk membentengi diri, jangan timbul kesan bahwa perubahan kurikulum dilakukan, karena adanya ketidaksiapan guru dalam pelaksanaan kurikulum KBK (Suparno, Kompas, 27 Februari 2006). Tak kalah pentingnya, bahwa pembatalan kurikulum KBK, mencerminkan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan di Indonesia yang selama ini hanya dilakukan dengan kurikulum coba-coba, tanpa ada pengkajian dan riset yang mendalam. Anggaran pendidikan kita selama ini hanya habis untuk urusan uji coba. Dengan demikian, jangan untuk meningkatkan mutu pendidikan, apa lagi untuk kesejahteraan guru dan dosen; sangat jauh dari harapan kita semua (Abduhzen, Kompas, 28 Februari 2006).

Jadi, hal yang penting menjadi pertimbangan bagi para pengambil keputusan di bidang pendidikan, adalah bahwa hendaknya perubahan kebijakan yang diambil tidak dilakukan secara mendadak, tetapi perlu perencanaan yang matang, dan sosialisasi merupakan kata kunci yang penting untuk menjamin siswa, guru dan sekolah tidak menjadi korban perubahan tersebut (Elin, Kompas, 24 Juli 2006).

3. Simpulan dan Saran

3.1 Simpulan

Diorama Pendidikan dan kurikulumnya sepanjang sejarah bangsa Indonesia merdeka, menunjukkan praktek pendidikan tidak pernah lepas dari metode uji coba kebijaksanaan di bidang pendidikan begitu mudah berubah. Kurikulum pendidikan yang seharusnya tidak gampang diubah, sebelum ada pengkajian dan riset yang mendalam, telah menyebabkan sektor pendidikan di tanah air belum mampu mengatasi ketertinggalan bangsa ini dalam mengikuti kompetisi regional dan global.

Dampak berikutnya, banyak kebijakan yang dilakukan sebagai kebijakan yang bersifat instan dan tidak didasari atas pertimbangan pedagogis edukatif. Ke depan yang perlu dilakukan bukan mengkutak-tatik kurikulum yang sudah ada, melainkan kita harus memusatkan perhatian yang serius pada pembenahan infrastruktur persekolahan yang banyak mengalami kerusakan, seperti gedung-gedung sekolah yang telah runtuh dimakan usia. Selain itu perhatian serius juga harus dipusatkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga guru dan dosen; pemberian akses kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi anak-anak didik sebagai garda

terdepan bangsa dalam memajukan pendidikan nasional.

Catatan sejarah tentang pelajaran terhadap praktik pendidikan dan kurikulumnya, harus segera diperbaiki kembali dengan memfokuskan perhatian pada isi, visi, misi dan orientasi pendidikan yang berlandaskan pada pendidikan untuk semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Saatnyalah pemerintah menjadikan pilar pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional bangsa ke depan. Saya khawatir sepuluh tahun yang akan datang, bangsa kita akan menjadi bangsa buruh atau kuli di negerinya sendiri. Sekarang saja kita jauh tertinggal dengan negara-negara sesama anggota ASEAN lainnya. Kalau tidak segera pendidikan di tanah air dijadikan prioritas utama pembangunan, sebenarnya secara kultural, bangsa ini sudah menggali liang lahatnya sendiri. Semoga hal ini tidak terjadi dan menjadi mimpi buruk bagi bangsa kita.

3.2 Saran

Memperhatikan situasi dan kondisi pengelolaan pendidikan di Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka ada lima hal yang perlu dilakukan sebelum suatu pergantian kurikulum atau pemberlakuan kuri-

kulum baru, yaitu: (1) sebelum kurikulum baru ditetapkan, guru di seluruh Indonesia harus dibantu memahami isi dan hakekat kurikulum yang baru itu. Oleh karena itu, perlu sosialisasi yang sungguh merata di seluruh Indonesia. Pemerintah tidak boleh berasumsi atau menganggap bahwa guru akan tahu sendiri, atau mereka akan belajar sendiri setelah kurikulum ditetapkan. (2) Untuk mempercepat sosialisasi, teks kurikulum yang baru diperbanyak untuk semua guru di seluruh Indonesia. Lalu orang-orang yang sudah ditatar dengan kurikulum baru itu diterjunkan ke seluruh daerah untuk membantu sosialisasi. (3) Media komunikasi, surat kabar, dan jaringan internet dapat digunakan sebagai media sosialisasi kurikulum yang baru, sehingga dapat terjangkau lebih cepat di seluruh pelosok

Indonesia. (4) Guru perlu dibantu agar dapat menyikapi kurikulum apapun secara bijak, sehingga tidak menjadi bingung. Guru perlu menyadari, bahwa meskipun kurikulum nantinya tidak lagi menggunakan KBK, namun mereka telah terbantu dalam proses kegiatan belajar-mengajar KBK. Guru perlu dibantu bersikap cerdas untuk mengambil hal yang sungguh baik dan berguna dari kurikulum KBK ataupun kurikulum lama, meskipun kurikulum baru ditetapkan. (5) Sangat penting bagi guru untuk mengembangkan sikap terbuka dan kemandirian dan percaya diri. Sebab bagaimanapun juga, proses pendidikan di sekolah ada di tangan guru. Guru harus yakin, bahwa mereka dapat menyumbangkan sesuatu yang terbaik bagi kemajuan anak-anak bangsa lewat kurikulum apapun.

Pustaka Acuan

- Abduhzen, Muhammad. *Kurikulum Hanya Acuan Awal*, Kompas, 28 Februari 2006.
- Ali, Arifin. *Guru Jangan Ikut Terombang Ambing*, Kompas, 21 Februari 2006.
- Boediono dan Ella Yulaelawati. *Penyusunan Kurikulum Berbasis Kemampuan Dasar: Dasar Pemikiran*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Oktober 1999, Tahun ke-5, No. 019, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Depdikbud.
- Driana, Elin. *Ujian Nasional dan Perubahan Kurikulum*, Kompas, 24 Juli 2006.

- Drost, J. *Potret Pendidikan di Indonesia dan Peran Guru Swasta*, Kompas 2 Juli 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdikbud, Jakarta
- _____, 1990, *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah*, Depdikbud, Jakarta.
- _____, 1988, *Rapat Koordinasi Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta.
- _____, 1989, *Rapat Koordinasi Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Edisi Juni 2002, Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdikbud.
- _____, 1993. *Kurikulum 1994 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, K.93. Jakarta: Depdikbud.
- _____, 2003, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdiknas, Jakarta.
- Ibrahim, M. Djamil. *Perspektif Transparansi Global dalam Kurikulum*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Oktober 1999, Tahun ke-5, No. 019, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Imam Santoso, Slamet. 1995. Kualitas dan Efisiensi dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Edisi Khusus Nomor 2 Tahun XV.
- Keputusan MPRS No II/MPRS/1960 tentang Manusia Sosialis Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.
- Ketetapan MPRS No XXVII/MPRS/1966, Tentang Tujuan Pendidikan Nasional
- Malna, Afrizal. *Kenapa Manusia Tidak Berjalan Mundur*, Kompas, 5 Agustus 2005.
- Nasrullah, Nara. *Ubah Paradigma Mengajar Guru*, Kompas, 24 Februari 2006.
- Nyoman, S. Degeng, *Indikator Guru Profesional dan Kompeten*, Makalah Seminar Pendidikan Nasional pada tanggal 16 Juli 2006 diselenggarakan oleh Program UPP PGSD dengan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi

Selatan di Universitas Negeri Makassar.

Permanasari, Indira. *Tagihan yang Tidak Nyambung: Catatan Pendidikan Akhir Tahun (Bagian ke-50)*, Kompas, 30 Desember 2005.

Rahman, Arief. *Suara Pembaruan*, 23 Mei 2002.

Silverius, Suke. *Masa Depan Kurikulum Masa Depan*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Januari 2004, Tahun ke-10, No. 046, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Suparno, Paul. *Siapkan Guru Sebelum Kurikulum Berubah*, Kompas, 27 Februari 2006.

Supriadi, Dedi. 1997. *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Jakarta: Rosdajaya Putra.

_____, 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Jakarta: Adicia Karya Nusa.

Susanto dan Rejeki. *Ribuan Guru Bantu Bahas Jadi PNS*, Kompas, 11 Juli 2005.

Sularto, ST. *Praksis Pendidikan Minus Visi*, Kompas, 16 Agustus 2005.

_____, *Kurikulum Tak Korbankan Anak*, Kompas, 22 Februari 2006.

Syamsuddin, M. 1998, *Pemberdayaan Sistem Perencanaan dan Manajemen Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Kinerja Sekolah*, Jakarta: Dirjen Dikti URGE.

Tintin, Neneng T. 2003, *Desentralisasi Pendidikan di Tingkat Kelas: Jawaban Terhadap Gagasan Suke Silverius*, Makalah Program Pascasarjana Universitas Negeri Bandung.

Tilaar, HAR. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Rosida Karya.

_____, 2000, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Utomo, Prasetyo. *Kurikulum Baru, Buku Ajar, dan Kemandirian*, Kompas, 24 April 2006.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Wanei, Gerda, K. *Mempersiapkan Guru Menguasai Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Suara Pembaharuan, 9 September 2002.